



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR : 3 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi perlu menetapkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bupati adalah Bupati Sigi.
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- g. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan umum pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
  - o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Penanaman Modal;
  - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan Informatika;
  - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - aa. Kehutanan;
  - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - cc. Kelautan dan Perikanan;
  - dd. Perdagangan; dan
  - ee. Perindustrian;

- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 4**

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

## **Bagian Kedua**

### **Urusan Wajib**

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;

- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan

### **Bagian Ketiga**

#### **Urusan Pilihan**

##### **Pasal 6**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Perikanan darat;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian;

##### **Pasal 7**

Rincian urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Urusan Pemerintahan Sisa**

**Pasal 8**

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintah daerah yang melalalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 10**

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

#### **Pasal 12**

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang penyelenggaraannya oleh pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Segala Ketentuan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan di Kabupaten Sigi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dipedomani, sambil menunggu pengaturan yang diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
Pada tanggal 2010

**Pj. BUPATI SIGI,**

**SUTRISNO N. SEMBIRING**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten, maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dan disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, sepanjang menjadi kewenangan kabupaten yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran pertama Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Untuk itu pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintahan kabupaten menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggung jawaban pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten), maka pemerintahan daerah kabupaten bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten dalam satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintah daerah kabupaten sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintah daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani pemerintahan, maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan kabupaten tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

## **A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

### **1) Kebijakan**

1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi
- b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional
2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal
- b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
- c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
- d. Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional
7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten

### **2) Pembiayaan**

1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
- b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya

### **3) Kurikulum**

1. a. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
- b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar

2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar

#### **4) Sarana dan Prasarana**

1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan non formal
- b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal

#### **5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

1. a. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya
- b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
2. Pemindehan pendidikan dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten
3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
- b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

#### **6) Pengendalian Mutu Pendidikan**

- 1) Penilaian
  1. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
  2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten
  3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten



- 2) Evaluasi
  1. Pelaksanaan evaluasi pengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten.
- 3) Akreditasi
 

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal
- 4) Penjaminan Mutu
  - a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal dan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
  - b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
  - c. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

## **B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

### **1) Upaya Kesehatan**

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
  1. Penyelenggaraan survailans edimiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten
  2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten.
  3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten.
  4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten
- 2) Lingkungan Hidup
  1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten
  2. Penyehatan lingkungan
- 3) Perbaikan Gizi Masyarakat
  1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten
  2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten
    - b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

- 4) Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
  1. Penyelenggaraan kesehatan haji skala Kabupaten
  2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder skala kabupaten
  3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten
  4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
  5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi
  - b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.

## **2) Pembiayaan Kesehatan**

Pembiayaan kesehatan masyarakat

1. a. Pengelolaan / penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
- b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)

## **3) Sumber Daya Manusia Kesehatan**

1. Peningkatan Jumlah Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
  - a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
  - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten
  - c. Pelatihan teknis skala Kabupaten
  - d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
  - e. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu

## **4) Obat dan Perbekalan Kesehatan**

- a. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan.
  1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten
  2. a. Pengembalian sampling / contoh sediaan farmasi di lapangan
  - b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
  - c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga
  - d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I

3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- b. Pemberian izin apotik, toko obat

#### **5) Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
2. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten

#### **6) Manajemen Kesehatan**

1. Kebijakan  
Penyelenggaraan, bimbingan dan operasional bidang kesehatan
2. Penilaian dan Pengembangan Kesehatan
  1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
  - b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten
  - c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten
3. Kerjasama Luar Negeri  
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten
4. Peningkatan pengawasan akuntabilitas  
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten
5. Kerjasama Luar Negeri.  
Pengelolaan SIK skala kabupaten.

### **C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**

#### **1) Sumber Daya Air**

- a. Pengaturan
  1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya air kabupaten
  2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
  3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
  5. Pembentukan wilayah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten.
- b. Pembinaan
  1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten

2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
  3. Menjaga efektifitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
  4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten
  5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten
  6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.
- c. Pembangunan/pengelolaan
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
  2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
  3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten
  4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten
  5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten
  6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang lebih 1000 ha.
  7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
- d. Pengawasan dan pengendalian  
Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten

## 2) Bina Marga

- a. Pengaturan.
1. Pengaturan jalan kabupaten :
    - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan
    - b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten atau desa dan jalan kota
    - c) Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota
    - d) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/ desa dan jalan kota
- b. Pembinaan
1. Pembinaan jalan kabupaten
    - a) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota
    - b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan
  2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota

- c. Pembangunan dan pengusahaa
  - 1. Pembangunan jalan kabupaten :
    - a) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
    - b) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota
    - c) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten /desa dan jalan kota
    - d) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota
- d. Pengawasan
  - 1. Pengawasan jalan kabupaten
    - a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
    - b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

### **3) Perkotaan dan Pedesaan**

- a. Pengaturan
  - 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan pedesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi)
  - 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pembangunan perkotaan dan pedesaan berdasarkan NSPK.
- b. Pembinaan
  - 1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten
  - 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten
- c. Pembangunan
  - 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi
  - 2. Penyelenggaran kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten
  - 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten
  - 4. Pembentukan lembaga/badan pengelolaan pembangunan perkotaan dan pedesaan di kabupaten
- d. Pengawasan
  - 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di kabupaten
  - 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

#### **4) Air Minum**

- a. Pengaturan
  1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten
  2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten
  3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun oleh pemerintah dan provinsi
  4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
- b. Pembinaan
  1. Penyelesaian masalah dan permasalahan di dalam wilayah kabupaten
  2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepala badan perusahaan, pelayanan (operator) BUMD.
- c. Pembangunan
  1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten.
  2. Pengembangan SAM di wilayah Kabupaten untuk pemenuhan SPM
  3. Fasilitas penyelenggaraan (Bantuan Teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPM
  4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten
  5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan skala Kabupaten
  6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
- d. Pengawasan
  1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten
  2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah
  3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

#### **5) Air Limbah**

1. Pengaturan
  1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
  2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten.
  3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
  4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten
- b. Pembinaan
  1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten

2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten
  3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayah dalam penyelenggaraan PS air limbah
- c. Pembangunan
1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM
  2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten
  3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten)
- d. Pengawasan
1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten
  2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten
  3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM

## **6) Persampahan**

1. Pengaturan
  1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
  2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten
  3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi
  4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan kabupaten
2. Pembinaan
  1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten.
  2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten
3. Pembangunan
  1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten
  2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten
4. Pengawasan
  1. Pengawasan terhadap pengembangan persampahan di wilayah kabupaten
  2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten
  3. Pengawasan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

## **7) Drainase**

1. Pengaturan.
  - a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan dan strategis kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

- b. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pemantauan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
- 2. Pembinaan
  - Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
- 3. Pembangunan
  - a. Penyelenggaraan masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
  - b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten
  - c. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten
- 4. Pengawasan
  - a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten
  - b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah kabupaten
  - c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

## **8) Permukiman**

- 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lesiba) yang berdiri sendiri :
  - a. Pengaturan
    - 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasiba / lesiba di wilayah kabupaten
    - 2. Penetapan peraturan daerah NSPK kasiba dan lesiba di wilayah kabupaten
  - b. Pembinaan
  - c. Pembangunan
    - 1. Penyelenggaraan pembangunan kasiba / lesiba di kabupaten
    - 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat internasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba.
    - 3. Penetapan izin Lokasi Kasiba / Lisiba di Kabupaten
  - d. Pengawasan.
    - 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten
    - 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba dan Lisiba di kabupaten.
    - 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten.



2. Pemukiman Kumuh / Nelayan
  - a. Pengaturan
    1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategis penanggulangan pemukiman kumuh / nelayan di wilayah kabupaten
    2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya pemukiman di wilayah kabupaten.
  - b. Pembinaan
  - c. Pembangunan
    1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten
    2. Pengelolaan peremajaan / perbaikan pemukiman kumuh / nelayan dengan rusunawa.
  - d. Pengawasan
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh di wilayah kabupaten
  - f. Evaluasi pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh di kabupaten.
  - g. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
3. Pembangunan Kawasan
  - a. Pengaturan.
    1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di lingkungan kabupaten.
    2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di kabupaten
  - b. Pembinaan
  - c. Pembangunan
 

Penyelenggaraan pembangunan Kawasan strategis nasional
  - d. Pengawasan
    1. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
    2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten.
    3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten

## **9) Bangunan Gedung dan Lingkungan**

1. Pengaturan
  - a. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
  - b. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
  - c. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten
  - d. Penyelenggaraan IMB gedung
  - e. Penetapan bangunan gedung
  - f. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
  - g. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan di lingkungan (RTBL)

2. Pembinaan
  - a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
  - b. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
3. Pembangunan
  - a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten
  - c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestirikan berskala lokal.
4. Pengawasan
  - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
  - b. Pengawasan dan penertiban pembangunan, manfaat, dan pembokaran bangunan gedung.
  - c. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestirikan yang berskala lokal.

#### **10) Jasa Konstruksi**

1. Pengaturan  
Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan
  - a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
  - b. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
  - c. Pembangunan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten
  - d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
  - e. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten
  - f. Penertiban perizinan usaha jasa konstruksi.
3. Pengawasan
  - a. Pengawasan kota tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
  - b. Pengawasan sesuai kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

## **D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN**

### **1) Pembiayaan**

1. Pembangunan baru
  - a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan
  - b. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan
  - c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
  - d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan pada para pelaku di tingkat kabupaten
  - e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
  - f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa
  - g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
  - h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
2. Perbaikan
  - a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan
  - b. Penyusunan NSPM kabupaten di bidang pembiayaan perumahan
  - c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
  - d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten
  - e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
  - f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa daya milik.
  - g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
  - h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten

### **2) Pembinaan Perumahan Formal**

- a. Pembangunan baru
  1.
    - a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
    - b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.
  3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten

4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan
6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha bahan bangunan, industri, bahan bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang
7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelola PSU skala kabupaten.
8. Melaksanakan hasil sosialisasi
9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan
10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknis pembangunan.
11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten
12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal
13. Perumusan percepatan pembangunan RPJP dan RPJM Kabupaten
14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten
15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi
16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimuli di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan
17. Pembangunan Rumah Contoh (RSH) sebagai stimuli pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.
18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik, penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

b. Perbaikan

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten
2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten
3. Pelaksanaan SPM Perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di kabupaten
4. Pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan
5. Penetapan harga sewa rumah
6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kabupaten

c. Pemanfaatan

1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan

2. Pelaksanaan pembantuan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil
3. Pengelolaan PSU bantuan pusat
4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten
5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan
6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional
7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus

### **3) Pembinaan Perumahan Swadaya**

#### **a. Pembangunan Baru**

1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

#### **b. Pemugaran**

1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya perbaikan
- c. Perbaikan
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya perbaikan
- d. Perluasan
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya perbaikan
- e. Pemeliharaan
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya perbaikan
- f. Pemanfaatan
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
  7. Sosialisasi kebijakan strategi program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya perbaikan

#### 4) Pengembangan Kawasan

##### a. Sistem Pengembangan Kawasan

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan
2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman daerah (RP4d-Kabupaten)
3. Pembinaan teknis penyusunan RP4d di wilayahnya
4. Penyusunan RP4d di wilayahnya
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan RP4d di skala kabupaten
6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4d di wilayahnya.

##### b. Kawasan Skala Besar

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar
2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

##### c. Kawasan Khusus

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya

##### d. Keterpaduan Prasarana Kawasan

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan
2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya



- e. Keserasian Kawasan
  - 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
  - 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah.
  - 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah.
  - 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah.
  - 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah.

## **5) Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pertanahan untuk Perumahan**

- a. Pembangunan Baru
  - 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
  - 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
  - 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  - 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten.
  - 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  - 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  - 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  - 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten
  - 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan di kabupaten.
  - 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  - 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  - 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  - 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

b. Pemugaran

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten.
5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten
9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan di kabupaten.
10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

c. Perbaikan

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten.
5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten
  9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- d. Perluasan
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten.
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten
  9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- e. Pemeliharaan
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan di kabupaten.
5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten
9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan di kabupaten.
10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

## **6) Pemanfaatan Teknologi Industri**

### **a. Pembangunan Baru**

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
3. Fasilitas pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.

- b. Pemugaran
  - 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 3. Fasilitas pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  
- c. Perbaikan
  - 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 3. Fasilitas pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  
- d. Pemeliharaan
  - 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 3. Fasilitas pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
  - 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.

e. Pemanfaatan

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
3. Fasilitas pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial, ekonomi, budaya serta PSU pendukung perumahan.

**7) Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya**

a. Pembangunan Baru

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

b. Pemugaran

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

c. Perbaikan

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

d. Perluasan

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

e. Pemeliharaan

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

- f. Pemanfaatan
  - 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  - 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  - 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  - 4. Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  - 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
  - 6. Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

## **E. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG**

### **1) Pengaturan**

- a. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten
- b. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai
- c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten

### **2) Pembinaan**

- a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang
- b. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang
- c. Pendidikan dan pelatihan
- d. Penelitian dan pengembangan
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten
- f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat
- g. Pengembangan dan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

### **3) Pembangunan**

- a. Perancangan Tata Ruang
  - 1. Penyusunan dan penetapan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
  - 2. Penyusunan dan penetapan tata ruang kawasan strategis kabupaten
  - 3. Penetapan rancangan detail data ruang untuk RTRWK
- b. Pemanfaatan Ruang
  - 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penata ruangan
  - 2. Pemanfaatan kawasan strategis
  - 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruangan
  - 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK



5. Pemanfaatan investasi dan kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
  6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruangan
  7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan rencana tata ruang strategis kabupaten
  8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
  9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
  2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten
  3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten
  4. Pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK
  5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK
  6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten

#### **4) Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten

## **F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

### **1) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

- a. Perumusan Kebijakan
1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten
  - b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten
  - c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa
  2. Pelaksanaan SPM kabupaten
  3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dengan swasta dalam negeri dan luar negeri
  4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten
  5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
  - b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten

6. a. Penetapan keserasian penggambaran perkotaan dan pedesaan skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian penggambaran perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten
  7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten
  8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten
  9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten
  10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten
  11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten
- b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi
1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten
  2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten
  3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten
    - b. Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten
  4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
    - b. Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan
  5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten
    - b. Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian pelayanan perkotaan di kecamatan/desa
  6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten
    - b. Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa
  7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten
  8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten
    - b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa
  9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa
    - b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan/desa

- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  - 1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten
  - b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa
  - 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam dan luar negeri skala kabupaten.
  - 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
  - 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten
  - 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten
  - 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten
  - 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten

## **G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

### **1) Perhubungan Darat**

- a. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten
  - 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas untuk umum
  - 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten
  - 4. Pengawasan dan penyelenggaraan mengemudi
  - 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C
  - 6. Pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang Tipe C
  - 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C
  - 8. Pembangunan terminal angkutan barang
  - 9. Pengoperasian terminal angkutan barang
  - 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten
  - 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten
  - 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota
  - 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten
  - 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten

15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten
  16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa
  17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata
  18. Pemberian izin usaha angkutan barang
  19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
  20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberian isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
  21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten
  22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten
  23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten
  24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten
  25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
  26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
  27. Perizinan penggunaan jalan selan untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten
  28. Pelaksanaan penyelidikan pelanggaran :
    - a) Perda kabupaten bidang LLAJ
    - b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
    - c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
    - d) Perizinan angkutan umum
  29. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten
  30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
  31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor
  32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten
  33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten
  34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten
  35. Pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten
  36. Pemberian izin usaha untuk mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
- b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten
  2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lalu lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
  3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
  4. Pengadaan kapal SDP
  5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan
  6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau
  7. Pembangunan pelabuhan SDP

8. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau
9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau
10. Pemberian rekomendasi rencana induk , DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi nasional dan antar negara
11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
13. Izin pembuatan tempat penimbungan kayu (logpon) jaringan terapung dan keramba di sungai dan danau
14. Penetapan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi
15. Pembangunan, pemeliharaan pengelukan alur pelayanan sungai dan danau kabupaten
16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten
18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten
20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan pada kabupaten
21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten

## **2) Perhubungan Udara**

1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat di kantor bandara
3. Penetapan / izin pembangunan bandara udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk

## H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### 1) Pengendalian Dampak Lingkungan

- a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten
  2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas
  3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten
  4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten
  5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten
  6. Izin lokasi pengelolaan limbah B3
  7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
  2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten
  4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten
- c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten
  2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten
  3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten
  4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten
  5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
  6. Penerapan pelaksanaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
  7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten
  8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
  9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
- d. Pengelolaan Kualitas Udara dan pengendalian pencemaran udara
  1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten
  2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala
  3. Koordinasi dan pelaksanaan kualitas udara skala kabupaten

4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber gerak dan tidak bergerak skala kabupaten
  5. Pemantauan kualitas udara ambient dan dalam ruang
- e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut
1. Pengaturan terhadap pencegahan, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten
  2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten
  3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
  4. Pengawasan penataan instrument pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten
  5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten
  6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten
  7. Penegakan hukum terhadap pengaturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
- f. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan
1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang terkait dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
  2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
  4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan lahan skala kabupaten
- g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa
1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
  2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah
  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten

- h. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat bencana
  1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten
  2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten
  3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan kabupaten
- i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup
  1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten
- j. Pengembangan Perangkat
  1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten
  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan
  3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- k. Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan
  1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten
- l. Pendidikan dan pelatihan
  1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten
  2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
- m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup  
 Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten
- n. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan
- o. Penegakan hukum lingkungan
- p. Perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
  1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten
  2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten
- q. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir
  1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten



2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten
  3. Pemantaun dampak deposisi asam skala kabupaten
- r. Laboratorium Lingkungan
1. Penyelidikan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

## **2) Konservasi sumber daya alam (SDA)**

### Keanekaragaman Hayati

- a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten
- b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten
- c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten
- d. Pemantauan data pengawasan pelaksanaan konservasi hayati skala kabupaten
- e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten
- f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten

## **I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

### **1. Izin Lokasi**

- a.
  1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
  2. Kompilasi bahan koordinasi
  3. Pelaksanaan rapat koordinasi
  4. Pelaksanaan penjualan lokasi
  5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait
  6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
  7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi
  8. Perimbangan dan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten
- b. Monitoring pembinaan perolehan tanah

### **2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**

- a. Penetapan lokasi
- b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan penyuluhan
- d. Pelaksanaan inventarisasi
- e. Pembentukan tim penilai tanah
- f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/tim penilai tanah

- g. Pelaksanaan musyawarah
- h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian
- i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian
- j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian
- k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan kantor

### **3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

- a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sertifikat tanah garapan
- b. Penelitian obyek dan subyek sengketa
- c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
- d. Koordinasi kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya
- e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

### **4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

- a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian
- b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

### **5. Penetapan Subyek dan Obyek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentase**

- a. Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia.
- b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentase.
- c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara
- d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan absentase sebagai obyek *landreform*
- e. Penetapan para penerima retribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentase berdasarkan hasil sidang panitia.
- f. Penertiban surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian.

### **6. Penetapan Tanah Ulayat**

- a. Pembentukan panitia peneliti.
- b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian
- c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat
- d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan ulayat
- e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten.
- f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

### **7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**

- a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim

- b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
- c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat fasilitas perjanjian
- d. Fasilitas perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam
- e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian

#### **8. Izin Membuka Tanah**

- a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan
- b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten
- c. Penerbitan izin membuka tanah dengan mempertimbangkan teknis dari kantor pertanahan kabupaten
- d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah

#### **9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten**

- a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten
- b. Kompilasi data dan informasi, yang terdiri dari :
  - 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat
  - 2) Rencana tata ruang wilayah
  - 3) Rencana pembangunan yang akan digunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten maupun investasi swasta.
- c. Analissis kekayaan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait
- d. Penyiapan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah
- e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait
- f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah
- g. Penyusunan draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah
- h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya sesuai dengan Keputusan Bupati
- i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait
- j. Evaluasi dan rencana penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan

## **J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **1. Pendaftaran Penduduk**

- a. Kebijakan  
Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten
- b. Sosialisasi  
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten
- c. Penyelenggaraan
  - 1) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
  - 2) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi :
    - a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    - b) Pendaftaran perubahan alamat
    - c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia
    - d) Pendaftaran warga Negara Indonesia tinggal sementara
    - e) Pendaftaran pindah datang antar Negara
    - f) Pendaftaran penduduk yang tinggal diperbatasan antar negara
    - g) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
    - h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk
    - i) Penatausahaan pendaftaran penduduk
- d. Pemantauan dan evaluasi  
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
- e. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan pendaftaran penduduk skala kabupaten
- f. Pengawasan  
Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten

### **2. Pencatatan Sipil**

- a. Kebijakan  
Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten
- b. Sosialisasi  
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, dan konsultasi pelaksanaan
- c. Penyelenggaraan
  1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
  2. Penyelenggaraan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi:
    - a) Pencatatan kelahiran
    - b) Pencatatan lahir mati
    - c) Pencatatan perkawinan
    - d) Pencatatan perceraian
    - e) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak

- f) Pencatatan perubahan nama
  - g) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
  - h) Pencatatan peristiwa penting lainnya
  - i) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta
  - j) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
  - k) Pinata usaha dokumen pencatatan sipil
- d. Pemantauan dan evaluasi  
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
  - e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia  
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran skala kabupaten
  - f. Pengawasan  
Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten

### **3. Pengelolaan Informasi Kependudukan**

- a. Kebijakan  
Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
- b. Sosialisasi  
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
- c. Penyelenggaraan
  - 1) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
  - 2) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten
  - 3) Penyediaan perangkat keras dan pelengkap lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk
  - 4) Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
  - 5) Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten
  - 6) a. Pembangunan Bank Data Kependudukan Kabupaten  
b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan
  - 7) Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutahiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan
  - 8) Penyiapan dan desiminasi informasi penduduk
  - 9) a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten  
b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil
- d. Pemantauan dan Evaluasi  
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten

- e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia  
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- f. Pengawasan  
Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

#### **4. Perkembangan Kependudukan**

- a. Kebijakan
  - 1) Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten
  - 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
- b. Sosialisasi
- c. Penyelenggaraan
  - 1) a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten  
b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
  - 2) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten
  - 3) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran
  - 4) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik
  - 5) Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten
- d. Pemantauan dan Evaluasi  
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
- e. Pembinaan
- f. Pengawasan  
Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan dan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

### **K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **1. Pengurus Utama Gender (PUG)**

- a. Kebijakan pelaksanaan PUG
  - 1) Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten
  - 2) Koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten

- b. Kelembagaan PUG
  - 1) Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan , lembaga non pemerintah skala kabupaten
  - 2) Koordinasi dan fasilitas kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kabupaten
  - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
- c. Pelaksanaan PUG
  - 1. a. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender, dan
    - b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
  - 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten
  - 3. Fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten
  - 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran
  - 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik
  - 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten
- d. Pemantauan dan Evaluasi
 

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
- e. Pembinaan
- f. Pengawasan
 

Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan dan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

## **2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

- a. Kebijakan kualitas hidup perempuan
 

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.
- b. Pengintegrasian kebijakan kualitas hidup perempuan
 

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan
 

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.

- d. Kebijakan perlindungan perempuan  
Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia karena bencana skala kabupaten.
- e. Pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan  
Fasilitas pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
- f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan  
Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

### **3. Perlindungan Anak**

- a. Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak
  - 1) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
  - 2) Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
- b. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan  
Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten
- c. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak  
Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

### **4. Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha**

- a. Penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak  
Fasilitas penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
- b. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - 1) Fasilitas pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
  - 2) Fasilitas lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.



## 5. Data dan Informasi Gender dan Anak

- a. Data terpilah menurut jenis kelamin dari setiap bidang terkait Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
- b. Data dan informasi gender dan anak
  - 1) Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.
  - 2) Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
  - 1) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten
  - 2) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
  - 3) Penyusunan modul informasi (mediasi dan advokasi) skala kabupaten

## L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

- a. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
  - 1) a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
  - c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten
- 2) a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- 3) a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

- b. Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB
- c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB
- d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB
- e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi
- f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
- g. Pembinaan penyuluh KB
- h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 4) a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten
- b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara berkontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
- c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara berkontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
- 5) a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten
- b. Pelaksanaan *informed choice* dan informed consent dalam program KB

## **2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)**

- a. Kebijakan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi
  - 1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
  - 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
  - b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
  - 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten
  - c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
  - d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
  - e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.

- f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - g. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten

### **3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**

- a. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
  - 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten
  - 2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten
  - b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.
  - 3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kabupaten
  - b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
  - e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.
  - f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.
  - g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.

### **4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas**

- a. Kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
  - 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
  - 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten

- b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
  - c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
  - d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB
  - e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
  - f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran media teknis, tokoh masyarakat dan agama.
- b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB
  - c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB
  - d. Penyediaan dukungan operasional IMMP dalam program KB nasional
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional
  - f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian
  - g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten
  - h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
  - i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten
  - j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten
  - k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.

## **5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

- a. Kebijakan dan pelaksanaan advokasi dan KIE
  - 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan operasional advokasi dan KIE skala kabupaten
  - 2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten
  - b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten
  - 3. a. Pelaksanaan advokasi KIE serta konseling program KB dan KRR
  - b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jejaring institusi program KB
  - c. Pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas
  - d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi

## **6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga**

- a. Kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga
  1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan keluarga skala kabupaten
  - b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten
  2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten
  - b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten
  3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional
  - b. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
  - c. Pengolahan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana
  - d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah
  - e. Pemanfaatan operasional jejaring komunikasi data dalam pelaksanaan government dan melakukan desiminasi informasi

## **7. Keserasian Kebijakan Kependudukan**

- a. Keserasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan
  1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas), kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten
  2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten
  3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten
  - b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten

## **8. Pembinaan**

1. Kebijakan pelaksanaan pembinaan  
Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB nasional di kabupaten

## **L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

### **1. Kebijakan Bidang Sosial**

Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional

### **2. Perencanaan Bidang Sosial**

Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten

### **3. Kerjasama Bidang Sosial**

Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten

### **4. Pembinaan Bidang Sosial**

- a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standardisasi
- c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi
- d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten

### **5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten

### **6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

- a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten
- b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten

### **7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial**

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten

### **8. Pengawasan Bidang Sosial**

Pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten

### **9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial**

Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial

### **10. Sarana dan Prasarana Sosial**

Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten

### **11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial**

- a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten
- b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala kabupaten
- c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten

### **12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial**

Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten

### **13. Penganugerahan Tanda Kehormatan**

- a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial
- b. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten

**14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial**

- a. Pelestarian nilai-nilai  
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pusat atau Provinsi skala kabupaten
- b. Pemerintahan Taman Makam pahlawan (TMP)  
Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP di kabupaten
- c. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)
- d. Penganugerahan Gelar pahlawan dan Perintis Kemerdekaan  
Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan

**15. Penanggulangan Korban Bencana**

Penanggulangan korban bencana skala kabupaten

**16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)**

- a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten
- b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten

**17. Undian**

- a. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten
- b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten

**18. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Lanjut Usia, Tidak Potensial terlantar, yang Berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu**

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.

**19. Pengasuhan dan pengangkatan Anak**

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten

## **M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

### **1. Ketenagakerjaan**

- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
  - 1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penerapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 2) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 3) Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
  - 1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 2) Perencanaan formasi karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten
  - 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 5) Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten
- c. Pembinaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
  - 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten
  - 2)
    - a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktifitas skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan program peningkatan produktifitas di wilayah kabupaten
  - 3) Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
  - 4) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten
- d. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri
  - 1)
    - a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja
    - b. Penyusunan, pengolahan dan analisis data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten
    - c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten
    - d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja
    - e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten



- 2) a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja/LPPKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten  
 b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPPKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten
  - 3) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* skala kabupaten.
  - 4) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja, penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten
  - 5) a. Penyuluhan rekrutmen, seleksi, dan pengesahan dan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD / Antar Kerja Lokal (AKL)  
 b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten
  - 6) a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten  
 b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten  
 c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM
  - 7) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
  - 8) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
  - 9) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten
  - 10) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
- e. Pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- 1) a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten  
 b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten
- f. Pembinaan hubungan industrial dan Jasmani Sosial Tenaga Kerja
- 1) a. Fasilitas penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten  
 b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten  
 c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten
  - 2) a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten  
 b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi

- 3) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten
  - 4) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
  - 5) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten
  - 6) Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
  - 7) a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten  
b. Penyusunan dan pengusulan pemantapan upah minimum kabupaten kepada gubernur
  - 8) a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten  
b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten
  - 9) Pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten
  - 10) Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten
  - 11) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi oekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkan kepada provinsi
  - 12) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.
- g. Pembinaan ketenagakerjaan
- 1) Pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 2) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 3) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 4) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 5) a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten  
b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten
  - 6) Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
  - 7) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
  - 8) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 9) Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 10) Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten
  - 11) Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
  - 12) Pengusulan calon pegawai pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

- 13) Pengusulan penertiban kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
- 14) Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.

## **2. Ketransmigrasian**

- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
  - 1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
  - 2) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
  - 3) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang ketransmigrasian skala kabupaten
  - 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
  - 5) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah/kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
  - 6) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
- b. Pembinaan SDM Aparatur
  - 1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah kabupaten.
  - 2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di bidang pemerintahan daerah kabupaten.
  - 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah kabupaten.
  - 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
  - 5) Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
- c. Penyiapan pemukiman dan penempatan
  - 1) a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT dan LPT di wilayah kabupaten.  
b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.  
c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.  
d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

- 2) a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten  
b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten
  - 3) Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten
  - 4) KIE ketransmigrasian skala kabupaten.
  - 5) a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten  
b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten
  - 6) a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain  
b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
  - 7) Sinkronisasi pembangunan WPT dan LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  - 8) a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.  
b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
  - 9) Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
  - 10) Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
  - 11) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
- d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 1) Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - 2) Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT dan LPT skala kabupaten.
  - 3) Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT dan LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
  - 4) Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT dan LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
  - 5) Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT dan LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  - 6) a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten  
b. Pengusulan calon WPT dan LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
  - 7) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- e. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 1) a. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.  
b. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.

- c. Penyamaan persepsi, kesepahaman dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - d. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- 2)
- a. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - b. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah transmigrasi wilayah kabupaten.
  - c. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - d. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - e. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - f. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - g. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - h. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - i. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
- 3)
- a. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - b. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - c. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - d. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - e. Bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - f. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - g. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - h. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - i. Fasilitas akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - j. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - k. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - l. Fasilitasi, pelayanan dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.

- 4)
  - a. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - b. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - c. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  - d. Fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah dan regional.
  - e. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan regional.
  - f. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
- 5)
  - a. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - b. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - c. Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - d. Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - e. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - f. Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  - g. Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
- 6)
  - a. Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi skala kabupaten.
  - b. Fasilitasi pengalihan tanggung jawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi.
  - c. Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di kabupaten bersama provinsi

## **N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

### **1. Kelembagaan Koperasi**

- 1) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi
- 2) a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten  
b. Fasilitasi pelaksanaan, pengesahan, dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.
- 3) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten
- 4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.
- 5) a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi ditingkat kabupaten  
b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten

### **(Tugas Pembantuan)**

### **2. Pemberdayaan Koperasi**

- 1) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :
  - a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  - b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
  - c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
  - e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- 2) Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- 3) Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- 4) Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten;

### **3. Pemberdayaan UMKM**

- 1) Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam pertumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional meliputi :
  - a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
  - b. Persaingan;
  - c. Prasarana;
  - d. Informasi;
  - e. Kemitraan;
  - f. Perjanjian;
  - g. Perlindungan;

- 2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi :
  - a. Produksi;
  - b. Pemasaran;
  - c. Sumber daya manusia;
  - d. Teknologi;
- 3) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi :
  - a. Kredit bank;
  - b. Penjaminan lembaga bukan bank;
  - c. Modal ventura;
  - d. Pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN;
  - e. Hibah;
  - f. Jenis pembiayaan lain;

#### **4. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi**

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.

### **O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

#### **1. Kebijakan Penanaman Modal**

- a. Kebijakan Penanaman Modal
  - 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
  - 2) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
  - 3) Mengkoordinasi, perumusan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
    - a. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
    - b. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan tertentu.
    - c. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - d. Pemetaan investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha kecil, menengah dan besar.
    - e. Usulan dan pemberian intensif penanaman modal di luar fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
  - 4) Penetapan peraturan daerah tentang penanaman modal di kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## **2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal**

- a. Kerjasama Penanaman Modal
  - 1) Melaksanakan dan mengajukan usulan materi serta fasilitas kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
  - 2) Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitas kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- b. Promosi dan Penanaman Modal
  - 1) Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
  - 2) Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - 3) Koordinasi, pengkajian dan penetapan materi promosi skala kabupaten.
- c. Pelayanan Penanaman Modal
  - 1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman, tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - 2) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - 3) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - 4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 1) Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
  - 2) Pelaksanaan, pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal provinsi.
- e. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
  - 1) Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
  - 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

## **P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **1. Kebijakan Bidang Kebudayaan**

#### **a. Kebudayaan**

- 1) Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
- 3) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
- 4) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.

#### **b. Tradisi**

- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.

#### **c. Perfilman**

- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
- 2) Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.
- 3) Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
- 4) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
- 5) Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.
- 6) Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
- 7) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman
- 8) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman
- 9) Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.
- 10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.
- 11) Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.

**d. Kesenian**

- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
- 2) Penerbitan rekomendasi dan pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.
- 3) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten.
- 4) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten.
- 5) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten.

**e. Sejarah**

- 1) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.
- 2) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
- 3) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
- 4) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
- 5) Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.
- 6) Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.
- 7) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
- 8) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.
- 9) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.

**f. Purbakala**

- 1) Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*", skala kabupaten.
- 2) Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
- 3) Penerapan BCB/situs skala kabupaten
- 4) Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten

- 5) Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
- 6) Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten
- 7) Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.

## **2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan**

### **a. Penyelenggaraan**

- 1) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten meliputi :
  - a) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa
  - b) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat
  - c) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan
  - d) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
  - e) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- 2) Monitoring dan Evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi :
  - b) Pelaksanaan dan hasil kegiatan
  - c) Pengendalian dan pengawasan kegiatan
  - d) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat
  - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.
  - f) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten
  - g) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.
- 3) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten
- 6) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten
- 7) Penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten.
- 8) Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten
- 9) Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten
- 10) Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten
- 11) Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten
- 12) Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten
- 13) Perizinaan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi
- 14) Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten
- 15) Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten
- 16) Pelaksanaan kongres sejarah di tingkat daerah di kabupaten

- 17) Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten
- 18) Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten
- 19) Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten
- 20) Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten
- 21) Pemetaan sejarah skala kabupaten
- 22) Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten
- 23) Penanganan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten
- 24) Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kabupaten
- 25) Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten
- 26) Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, BCB / situs skala kabupaten
- 27) Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perindugan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten
- 28) Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah
- 29) Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten
- 30) Registrasi museum dan koleksi di kabupaten
- 31) Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten
- 32) Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten

### **3. Kebijakan Bidang Kepariwisata**

#### **a. Kebijakan**

- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten :
  - a) RIPP kabupaten
  - b) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata
  - c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata
  - d) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
  - e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten
  - f) Penetapan dan pelaksanaan pedoman, perencanaan, pemasaran skala kabupaten
  - g) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten
  - h) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
  - i) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten

- 2) Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten
- 3) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten
- 4) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten
- 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten

#### **4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan**

##### **a. Penyelenggaraan**

- 1) Penyelenggaraan promosi skala kabupaten :
  - a) Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata
  - b) Peserta / penyelenggara pameran / *event*, *roadshow* bekerjasama dengan pemerintah / provinsi
  - c) Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten
  - d) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten
  - e) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten
  - f) Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi
- 2) Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten
- 3) Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten.

#### **5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten
- d. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan balai arkeologi

## **Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

### **a. Kepemudaan**

1. Kebijakan di bidang kepemudaan  
Penetapan kebijakan dibidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
  - a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
  - b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
  - c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral
  - d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas
  - e. Kemitraan dan kewirausahaan
  - f. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ)
  - g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, dan kepeloporan
  - h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi
  - i. Peningkatan prasarana dan sarana
  - j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi
  - k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan
  - l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan
  - m. Pencegahan dan perlindungan bahasa destruktif.
2. Pelaksanaan  
Pelaksanaan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
  - a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional
  - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten
  - c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional
  - d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga
  - e. Pendanaan keolahragaan
  - f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
  - g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
3. Koordinasi  
Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :
  - a. Koordinasi antar dinas instansi terkait
  - b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah
  - c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
4. Pembinaan dan Pengawasan  
Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :
  - a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
  - b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan
  - c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan

- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan
- e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintah di kabupaten
- f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan
- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan
- h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.

## **b. Olahraga**

### **1. Kebijakan di bidang keolahragaan**

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Pengembangan keserasian kebijakan olahraga
- b. Penyelenggaraan keolahragaan
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
- d. Pengelolaan keolahragaan
- e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
- f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
- h. Pendanaan keolahragaan
- i. Pengembangan IPTEK keolahragaan
- j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan
- k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
- l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat
- m. Pengembangan manajemen olahraga
- n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga
- o. Pengembangan IPTEK olahraga
- p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, maneger, dan pembina olahraga
- q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga
- r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga
- s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat olahraga
- t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
- u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan
- v. Kriteria lembaga keolahragaan
- w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat



## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten

- a. Aktivasi keolahragaan skala kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional
- b. Fasilitas dan dukungan aktivasi keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten
- c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten / kota, provinsi, pemerintah dan internasional
- d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga
- e. Pendanaan keolahragaan
- f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
- g. Pembangunan serta pembinaan prestasi olahraga

## 3. Koordinasi

Koordinasi di bidang kepemudaan skala kabupaten

- a. Koordinasi antar dinas instansi terkait
- b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah
- c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.

## 4. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten

- a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
- b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan
- c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan
- e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten
- f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan
- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan
- h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan
- i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga
- j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga
- k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana.

## **R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

### **1. Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan**

- 1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  
Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kegiatan  
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
- 5) Peningkatan kapasitas aparatur  
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

### **2. Kewaspadaan Nasional**

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

- b. Pelaksanaan kegiatan.  
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing skala kabupaten.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur.  
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

### **3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.**

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan.  
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur.  
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

#### **4. Politik Dalam Negeri**

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan.  
Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur.  
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

## 5. Ketahan Ekonomi

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.  
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan.  
Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.  
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur.  
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

**S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.**

**1. Otonomi daerah.**

- a. Urusan pemerintahan.
  - 1) Kebijakan.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.
  - 2) Pembinaan, sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
    - a) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
    - b) Penyelenggaraan pemerintahan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.
  - 3) Harmonisasi.
    - a) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
    - b) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
  - 4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
    - a) Penyusunan LPPD kabupaten
    - b) Penyampaian LPPD kabupaten kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
  - 5) *Database*

Pengolahan *database* LPPD skala kabupaten.
- b. Penataan daerah dan otonomi khusus (otsus) :
  1. Kebijakan.
    - a. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah
    - c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
  2. Pembentukan daerah
    - a) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
    - b) Pembentukan kecamatan

- c) a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama kabupaten dan pemindahan ibukopta daerah
    - b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
- 3. Pembinaan, sosialisasi, observasi, dan pengkajian penataan daerah dan otsus
  - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
  - b) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
- 4. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.
  - a) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten
  - b) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.
- 5. Pembangunan sistem (*database*) penataan daerah dan otsus.
  - a) Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah dan otsus skala kabupaten
  - b) Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.
- 6. Pelapor
  - b. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah kabupaten
  - c. Pengelolaan database laporan penataan daerah skala kabupaten
  - d. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada menteri dalam negeri melalui gubernur
- c. Fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) dan hubungan antar lembaga (HAL) :
  - 1. DPOD
    - a) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD
    - b) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
  - 2. Penyusunan peraturan daerah (Perda)
    - a) Penyusunan perda kabupaten
    - b) Pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur
    - c) Menyampaikan perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.

3. Fasilitasi asosiasi daerah/badan kerjasama daerah.  
Membentuk asosiasi daerah/badan kerjasama daerah.
- d. Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah.
  1. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) :
    - a) Kebijakan  
Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten
    - b) Pembinaan  
Penerapan SPM kabupaten.
  2. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  3. Pengembangan kapasitas daerah :
    - a) Kebijakan
      - 1) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah
      - 2) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
    - b) Pelaksanaan
      - 1) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten
      - 2) Fasilitasi implementasi rencana kabupaten.
    - c) Pembinaan  
Penerapan SPM kabupaten.
- e. Pejabat negara :
  1. Tata tertib DPRD :
    - a) Kebijakan  
Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten
    - b) Pembinaan  
Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten/kota
  2. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD provinsi/kabupaten.
  3. Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah (KDH) dan wakil KDH : provinsi/kabupaten.
    - a) Kebijakan
    - b) Pelaksanaan  
Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  4. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD :
  5. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD :
    - a. Kebijakan  
Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten
    - b. Pembinaan



6. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :
  - a) Kebijakan  
Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
  - b) Pembinaan
7. Tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah :
  - a) Kebijakan
  - b) Pembinaan

## **2. Pemerintahan Umum**

- a. Fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama
  - 1) Fasilitas dekonsentrasi
  - 2) Fasilitasi tugas pembantuan
    - a) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan /atau pemerintah provinsi
    - b) Koodinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan kepada desa.
  - 3) Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga
    - a) Penetapan kebijaksanaan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga
    - b) Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga
    - c) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
  - 4) Kerjasama antar daerah
    - a) Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten
    - b) Pelaporan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.
  - 5) Pembinaan wilayah
    - a) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
    - b) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa /kelurahan di wilayahnya.
    - c) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.
    - d) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten
    - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten
  - 6) Koordinasi pelayanan umum  
Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.

- b. Trantibum dan Linmas
  - 1. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
    - a) Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
      - 1) Penegakan perda/peraturan kepala daerah
      - 2) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
      - 3) Kepolisian pamongprajaan dan PPNS
      - 4) Perlindungan masyarakat.
    - b) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kabupaten
    - c) Pelaksanaan polisi kepamongprajaan dan PPNS skala kabupaten
    - d) Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten
    - e) Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.
  - 2. Koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
    - Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.
- c. Wilayah perbatasan :
  - 1. Pengelolaan perbatasan antar negara.
    - a) Dukungan kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara
    - b) Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
  - 2. Perbatasan daerah
    - Penetapan kebijakan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
  - 3. Toponimi dan pemetaan wilayah
    - a) Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten
    - b) Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
    - c) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
  - 4. Pengembangan wilayah perbatasan.
    - a) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
    - b) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
    - c) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
  - 5. Penetapan luas wilayah.
    - 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
    - 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

- d. Kawasan Khusus :
1. Kawasan sumber daya alam; kehutanan, energi dan sumber daya mineral.  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sejenisnya
  2. Kawasan sumber daya buatan; pelabuhan, bandar udara, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sejenisnya
  3. Kawasan kepentingan umum; kawasan fasilitas sosial dan umum.  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.
  4. Kawasan kelautan dan kedirgantaraan.  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.
- e. Manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana :
- 1) Mitigasi pencegahan bencana  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten
  - 2) Penanganan Bencana  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten
  - 3) Penanganan Pasca Bencana  
Penetapan kebijakan, koodinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan pasca bencana skala kabupaten
  - 4) Kelembagaan  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten
  - 5) Penanganan kebakaran  
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.

### **3. Administrasi Keuangan Daerah**

- a. Organisasi Dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
- b. Anggaran Daerah
  1. Penetapan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
  2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten.
  3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kabupaten.

4. Penetapan perda tentang APBD dan perubahan APBD.
  5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
  6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (repardes) Tentang APB Desa.
  7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
  8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa.
  9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintah antar desa.
  10. Fasilitas perencanaan dan penganggaran pemerintah desa.
- c. Pendapatan dan Investasi Daerah:
- 1) Pajak dan Retribusi Daerah.
    1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
    - b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
    - c. Fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa
  - 2) Investasi dan Aset Daerah
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
    - b) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
    - c) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
    - d) Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.
  - 3) Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dan Lembaga keuangan Mikro.
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten
    - b) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
    - c) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
  - 4) Pinjaman Daerah
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
    - b) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
    - c) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
- d. Dana Perimbangan :
- 1) Dana Alokasi Umum (DAU)
    - a) Pengelolaan dana dasar perhitungan alokasi DAU kabupaten
    - b) Pengelolaan DAU kabupaten
    - c) Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten

- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK
  - b) Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK)
  - c) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH)
  - a) Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten
  - b) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- e. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa
  - 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa
  - 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa
  - 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban bersama (urusan *concurrent*)
  - 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

#### **4. Perangkat Daerah**

- a. Kebijakan
  - 1) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten
  - 2) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten
  - 3) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten
  - 4) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten
  - 5) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten
- b. Pengembangan Kapasitas
  - 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten
  - 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
- c. Fasilitasi
- d. Pembinaan dan Pengendalian
  - Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah
- e. Monitoring dan Evaluasi

#### **5. Kepegawaian**

- a. Formasi pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - 1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
  - 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
  - 3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran

- b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
  2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
  3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
  1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten
  2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten
  3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten
- e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten
  2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten
  3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten
- f. Kenaikan Pangkat
  1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d
  2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
- g. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
  1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
  2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten
  3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi  
Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
- i. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri.  
Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten
- j. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana  
Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III ke bawah.
- k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Sipil (CPNS).  
Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten
- l. Pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.

- m. Pengawasan dan Pengendalian  
Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil (PNS)

## **6. Persandian**

- a. Kebijakan
  - 1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten
  - 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten
  - 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten
  - 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
- b. Pembinaan SDM
  - 1. Perencanaan kebutuhan SDN persandian skala kabupaten
  - 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten
  - 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- c. Pembinaan palsan  
Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.
- d. Pembinaan sissan  
Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten.
- e. Pembinaan Kelembagaan  
Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- f. Pengawasan dan pengendalian (Wasdal).
- g. Pengkajian.

## **T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **1) Pemerintah Desa dan Kelurahan**

- a. Kebijakan
  - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - 1. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  - 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.

3. Monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.  
*Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- c. Pengembangan Desa dan Kelurahan.
  1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.
  2. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (PBD)
  1. a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.  
b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
  2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitas PBD skala kabupaten.
  3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
- e. Keuangan dan Aset Negara
  1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
  2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
  3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
  4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
- f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
  1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.  
b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
  2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitas pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
  3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.



## **2) Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat**

### **a. Kebijakan**

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.  
Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
2. Pemantapan Data profil Desa dan Profil kelurahan skala kabupaten.
  - a) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
  - b) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
  - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
  - a. Koordinasi dan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
4. Pelatihan Masyarakat
  - a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
5. Pengembangan manajemen Pembangunan Partisipasi
  - a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan pembangunan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Pedesaan.
  - a. Koordinasi dan fasilitas peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.

- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.

### **3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat**

- a. Kebijakan
  1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
  2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
- b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara
  1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
  2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
- c. Pemberdayaan Perempuan
  1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
  2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
  2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
  1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
  2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
- f. Pengembangan dan perlindungan Tenaga Kerja
  1. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten
  2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.

#### **4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat**

- a. Kebijakan
  - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten
  - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten
- b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin
  - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
  - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
- c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok masyarakat
  - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
  - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
- d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan
  - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan skala kabupaten.
  - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan skala kabupaten.
- e. Pengembangan Produksi Dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
  - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
  - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
- f. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.
  - 1. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan pertanian tanaman pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
  - 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian tanaman pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten
  - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.**

### **a. Kebijakan**

1. Penetapan kebijakan
2. Penyelenggaraan pemberdayaan daerah skala kabupaten.

### **b. Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan**

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten
2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.

### **c. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan**

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten
2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.

### **d. Fasilitasi prasarana dan sarana pedesaan**

1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten

### **e. Fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna**

1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten
2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten

### **f. Pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan**

1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten
2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

## **U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

### **1. Statistik Umum**

#### a. Kebijakan

Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala kabupaten

#### b. Pengawasan, monitoring dan evaluasi

#### c. Fasilitasi dan pembinaan

### **2. Statistik Dasar**

#### a. Statistik dasar meliputi :

##### 1) Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten :

###### a. Sensus

###### b. Survei Antar Sensus

Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten

###### c. Survei Berskala Nasional

Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat

###### d. Survei Sosial dan Ekonomi

Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.

##### 2) Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional

### **3. Statistik Sektoral**

#### a. Koordinasi statistik antar sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.

### **4. Statistik Khusus**

#### a. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus

Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

## V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

### 1. Kearsipan

#### a. Kebijakan

- 1) Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
  - a) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
  - b) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
  - c) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
  - d) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
  - e) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
  - f) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

#### b. Pembinaan

Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

#### c. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan

Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.

#### d. Akreditasi dan Sertifikasi

#### e. Pengawasan / Supervisi

Pengawasan / supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa / kelurahan.

## **W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

### **1) Perpustakaan**

Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :

- a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional
- b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
- c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
- d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
- e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

### **2) Pembinaan Teknis Perpustakaan**

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :

- a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar
- b. Pengembangan SDM
- c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
- d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan
- e. Pengembangan minat baca.

### **3) Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional**

- a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional
- b. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.

### **4) Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan**

1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kabupaten nasional
2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyediaan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.

### **5) Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan**

### **6) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan**

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

## X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 1) Pos dan Telekomunikasi

- a. Pos
  1. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan
  2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
  3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
  4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- b. Telekomunikasi
  1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
  2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten
  3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
  4. Pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)
  5. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
  6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
  7. Penanggungjawaban panggilan darurat telekomunikasi.
- c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
  1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara komunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
  2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.
  3. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan)
  4. Pemberian izin instalasi penangkal petir
  5. Pemberian izin instalasi genset
- d. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
  1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi Pos dan Telekomunikasi
  2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
- e. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi  
Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.



## **2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi**

- a. Penyiaran
  - 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
  - 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi
- b. Kelembagaan komunikasi sosial.  
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten
- c. Kelembagaan komunikasi pemerintah
- d. Kelembagaan komunikasi pemerintah daerah  
Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
- e. Kemitraan Media  
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

## **Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.**

### **1) Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- a. Lahan Pertanian
  - 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten
  - 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
  - 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
  - 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan guna lahan pertanian wilayah kabupaten
  - 5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten  
b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.
  - 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten
  - 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten
  - 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
  - 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan.
- b. Air Irigasi
  - 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa
  - 2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi  
b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.

3. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai Air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai Air tanah (P3AT)
  - b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
  4. Bimbingan penetapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- c. Pupuk
1. Bimbingan penggunaan Pupuk
  2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten
  - b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk
  - c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
  3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida
  4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- d. Pestisida
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten
  2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten
  - b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pupuk
  - c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
  3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida
  4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Pertanian
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten
  2. Identitas dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten
  3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar
  4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
  5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten
  - b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian
  - c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian
  - d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokal kita
  - e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
  - f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f. Benih Tanaman
1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten
  - b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten
  2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten

3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten
4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten
5.
  - a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
  - b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.
  - c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih
  - d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode
  - e. Pemberian izin produksi benih
  - f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi
  - g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman
  - h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk
  - i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.
  - j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
6.
  - a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten
  - b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan
  - a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.
  - b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis
  - c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
  - d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
- g. Perlindungan Tanaman
  - a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten
  - d. Pemantuan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten
  - f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.

- h. Perizinan Usaha
  - 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- i. Teknis Budidaya
  - 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
- j. Pembinaan Usaha
  - 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
  - 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten
  - 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten
  - 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- k. Panen, pasca panen dan pengelolaan hasil
  - 1) a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 2) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 3) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
  - 4) a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengelolaan hasil wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.

- l. Pemasaran
  - 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  - 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  - 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
  - 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- m. Sarana usaha
  - 1. Sarana usaha wilayah kabupaten.
  - 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produk serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
- n. Pembangunan Statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.
  - 1) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  - 2) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- o. Pengawasan Evaluasi.

**b. Perkebunan**

- a. Lahan perkebunan
  - 1) a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
    - b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitas, konservasi, optimasi, dan wilayah pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten
    - c. Pengembangan, rehabilitas, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  - 2) a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupatenn.
    - b. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
    - c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
    - d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.
    - e. Penetapan serta komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
  - 3) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
- b. Pemanfaatan air untuk perkebunan.
  - 1) a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
    - b. Pemanfaatan air permukaan air untuk perkebunan.
    - c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.

- 2) a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
- b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
- c. Pemantauan dan evaluasi perkembangan air untuk perkebunan.
- c. Pupuk
  1. Bimbingan penggunaan pupuk.
  2. a. Pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  - b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
  - c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
  - d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamatan terhadap ketersediaan pestisida.
  3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- d. Pestisida
  1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  - b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
  - c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
  - d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamatan terhadap ketersediaan pestisida.
  - e. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Perkebunan
  - 1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
  - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
  - 3) Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar
  - 4) Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan
  - 5) a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten
  - b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan
  - c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan
  - d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokal kita
  - e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan  
Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.

- f. Benih perkebunan
  - 1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten
  - b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten
  - 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal
  - 3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten
  - 4. a. Bimbingan penetapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten
  - b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten
  - c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan
  - d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan
  - e. Bimbingan dan pemantuan produksi benih perkebunan
  - f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode
  - g. Pemberian izin produksi benih perkebunan
  - h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi
  - i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman
  - j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk
  - k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan
  - l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan
  - m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten
  - n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan
  - 1) a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan
  - b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan
  - c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan
  - d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
  - e. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
- h. Perlindungan Perkebunan
  - 1.a. Identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten

- c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten
  - d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
  - e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradiaksi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten
  - f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.
  4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten
- i. Perizinan Usaha
    1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
    - b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.
  - j. Teknis Budidaya
 

Bimbingan penetapan pedoman teknis budidaya perkebunan di wilayah kabupaten.
  - k. Pembinaan Usaha
    1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
    - b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten
    - c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten
    - d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten
    - e. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
  - l. Panen, pasca panen dan pengelolaan hasil
    1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten
    - b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten
    2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten
    3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten
    4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
    - b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.



- m. Pemasaran
  - 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten
  - 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten
  - 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten
  - 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten
- n. Sarana Usaha
  - 1. Bimbingan pengembangan sarana dan usaha wilayah kabupaten
  - 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten
- o. Pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan
  - 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten
  - 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten
- p. Pengawasan dan Evaluasi

**c. Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- 1. Kawasan Peternakan
  - 1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten
  - 2) a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat
  - c. Pengembangan lahan hijauan pakan
  - d. Penetapan padang penggembalaan.
- 2. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)
  - 1) a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
  - b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
  - 2) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
  - 3) a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
  - b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  - c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  - d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokal kita wilayah kabupaten

- e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
  - f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
  - g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
  - h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
  - i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
3. Pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
- a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmafet wilayah kabupaten.
  - b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmafet wilayah kabupaten.
4. Obat Hewan , Vaksin, Sera Dan Sediaan Biologis
- 1) Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
  - 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
  - 3) a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten.
  - b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
  - c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
  - 4) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
  - 5) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
  - 6) a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.
  - b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat
  - c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
  - d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
  - e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur, dan susu) wilayah kabupaten.
  - f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan diagnostik biologis hewan wilayah kabupaten
  - g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten
  - h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten.
  - i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.

## 5. Pakan Ternak

1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.  
b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten
3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten  
b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.  
c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan  
d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten  
e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konstat wilayah kabupaten.  
f. Bimbingan pembuatan, penggunaan, dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and suplement*) wilayah kabupaten.  
g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten.  
h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.  
i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten  
j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten  
k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten  
l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten

## 6. Bibit Ternak

- 1) a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten  
b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten  
c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten  
d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
- 2) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten
- 3) a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten  
b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten
- 4) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten
- 5) a. Pengadaan /produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten  
b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten  
c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat  
d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten  
e. Bimbingan Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten

- 6)
  - a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten
  - c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten
  - d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten
  - e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten
  - f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten
  - g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten
  - h. pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten
  - i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten
  - j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten
  - k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokasi spesifik) wilayah kabupaten
  - l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten
  - m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten
  - n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten
  - o. n. Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi wilayah kabupaten
  - p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten
  
7. Pembiayaan
  - a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten
  - b. Bimbingan dan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten
  - c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten
  - d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten
  - e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program kabupaten
  
8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  - 1) a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet, dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten

- b. Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH
  - c. Monitoring penerapan, persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV
  - d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten
  - e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan
  - f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten
  - g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten
- 2) a. Pengamatan penyelidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten
  - b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
  - 3) a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavek serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten
  - b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan
  - 4) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavaek wilayah kabupaten
  - 5) a. Penganggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten
  - b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten
  - c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten
  - d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten
  - e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke / dari wilayah Indonesia di wilayah kabupaten
  - 6) Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavek, satuan peyanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan
  - 7) Pengawasan lalu lintas hewan, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten
  - 8) a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek hewan mandiri, klinik hewan).
  - b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan
  - c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan
  - d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar
  - e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan

- f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil)
  - g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazar Analysys ckritical control point* (HACCP)
  - h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagar hewan
  - i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual / menular yang mewabah.
  - j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah
  - k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran poroduk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan
  - l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
  - m. Bimbingan pelaksanaan pemantuan penyakit soonosis
  - n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk asal hewan dan produk hewani dan pangan
  - o. Bimbingan pengamatan dan penyifikan evidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya.
  - p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten/kota.
  - q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavek serta kesejahteraan hewan di wilayah kabupaten
  - r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan
  - s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten
  - t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten
- 9) a. Pelaksanaan pelayanan medis /paramedic veteriner di kabupaten
- b. Pelaporan pelayanan medi/paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi
- 10) a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan efidiomologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya
- b. Bimbingan penerapan norma, standar, teknis pelayanan kesehatan hewan.
- c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar / masuk wilayah kabupaten

9. Penyebaran dan pengembangan peternakan

- 1) a. pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten  
b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten
- 2) a. Pemantauan lintas ternak wilayah kabupaten  
b. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten  
c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta
- 3) a. Bimbingan pelaksanaan dan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten  
b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan retribusi ternak wilayah kabupaten
- 4) Bimbingan pelaksanaan indentifikasi seleksi ternak wilayah kabupaten
- 5) Bimbingan pelaksanaan indentifikasi calon penggadu wilayah kabupaten
- 6) Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi
- 7) Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu
- 8) Pelaksanaan indentifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak
- 9) Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak
- 10) Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak

10. Perizinan / Rekomendasi

- 1) a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten  
b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan  
c. Pemberian izin praktek dokter hewan  
d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet  
e. Pendaftaran usaha peternakan  
f. Pemberian izin usaha RPH/RPU  
g. Pemantauan dan pengawasan izin usaha peternakan
- 2) a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan kabupaten  
b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten
- 3) Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop dan pet shop* wilayah kabupaten.
- 4) Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet

- 5) a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan
- b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan
- 6) Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan di wilayah kabupaten
- 7) Pemberian izin usaha alat budidaya hewan kesayangan kabupaten
- 8) pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan
- 9) a. Bimbingan standar teknisi unit usaha produk hewan
- b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKW wilayah kabupaten

#### 11. Pembinaan Usaha

- 1) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitaraan usaha peternakan wilayah kabupaten
- 2) a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
- b. Bimbingan pemantuan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan bahan asal wilayah kabupaten
- c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
- d. Bimbingan pengelolaan unit pengelolaan alat transportasi unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
- e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten
- f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
- g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
- h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisis usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran
- i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan
- j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
- k. Bimbingan pemantuan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usah peternakan wilayah kabupaten
- l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UTL di bidang peternakan wilayah kabupaten
- m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten
- 3) Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitaraan usaha peternakan wilayah kabupaten



12. Sarana Usaha

- a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar, sarana usaha wilayah kabupaten
- b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan, penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten

13. Panen, pasca panen dan pengolahan hasil

- a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
- b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budi daya peternakan wilayah kabupaten
- c. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dari unit penyimpanan dan kemadan hasil peternakan wilayah kabupaten
- d. 1. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten  
2. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten

14. Pemasaran

- a. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
- b. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten
- c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten

15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan

- a. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten
- b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten
- c. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten
- d. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten

16. Pengawasan dan evaluasi

**d. Ketahanan**

a) Ketahanan pangan

- 1. a. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
- b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal
- c. Pengembangan pembinaan penganeekaragaman produk pangan
- d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat
  - b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten
  - c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat
  3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten
  - b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan
  - c. Identifikasi kelompok rawan pangan
  4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten
  - b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten
  - c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
  - d. Informasi harga di kabupaten
  - e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten
  5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat
  - b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat
  - c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat
  - d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat
  - e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat
  - f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga
  6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten
  - b. Pengembangan dan fasilitas forum masyarakat kabupaten
  - c. Pengembangan "*trust fund*" di kabupaten
  - d. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan
  - e. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten
- b) Keamanan Pangan
- 1) Penerapan standar BMR wilayah kabupaten
  - 2) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten
  - 3) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten
  - 4) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten

#### **e. Penunjang**

1. Karantina Pertanian
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
  - a. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten
  - b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten
  - c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten
  - d. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan
3. Penyuluhan Pertanian
  - a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian
  - b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa
  - c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai dengan norma dan standar
  - d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian
  - e.
    1. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian
    2. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten
  - f. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
4. Penelitian dan pengembangan teknolog pertanian  
Bimbingan, pendampingan dan pengawasan dan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
5. Perlindungan varietas
  - a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten
  - b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten
6. Sumber Daya Genetik (SDG)
  - a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat
  - b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya
7. Standarisasi dan akreditasi
  - a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah
  - b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah
  - c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten
  - d. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan

- e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan.
- f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten
- g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian kabupaten
- h. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga infeksi sektor pertanian di kabupaten
- i. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian di kabupaten
- j. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten
- k. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

#### **A.A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

1. Inventarisasi Hutan  
Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten
2. Pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
3. Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi hutan lindung kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4. Penataan batas pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
5. Penetapan kawasan hutan produksi hutang lindung kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
6. Kawasan hutan dengan tujuan khusus  
Penunjukan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat penelitian dan pengembnagan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan Gubernur.
7. Penatagunaan kawasan hutan  
Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan

8. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan  
Pertimbangan penyusunan rencana bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi, serta industri wilayah pengelolaan hutan
9. Rencana Pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit KPHP  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP
10. Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahun) unit KPHP  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
11. Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
12. Rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.  
Pertimbangan teknis pengesahan Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana pengelolaan Tahunan (jangka Pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
15. Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi,  
Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten
16. Rencana pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka panjang) unit KPHL
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung  
Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka Panjang) unit KPHK
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kabupaten.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kabupaten.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru  
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kabupaten.

29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
30. Pengelolaan Taman Hutan.  
Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi dan taman hutan raya skala kabupaten.
31. Rencana Kehutanan  
Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten
32. Sistem informasi kehutanan (numeric dan special)  
Penyusunan sistem informasi kehutanan (numeric dan special) tingkat kabupaten
33. Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi  
Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
34. Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi  
Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi  
Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan  
Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
37. Penatausahaan Hasil Hutan  
Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
38. Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung  
Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran (*appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan  
Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan DAN Lahan termasuk Hutan Mangrove
  - a. Penetapan lahan kritis skala kabupaten
  - b. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS

- c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten
  - d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
41. Pengelolaan Derah Aliran Sungai  
Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten
  42. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan Mangrove
    - a. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten
    - b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
  43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan  
Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
  44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten
  45. Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan sekitar hutan  
Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan sekitar kawasan hutan
  46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan  
Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
  47. Hutan Kota  
Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamatan hutan kota
  48. Perbenihan Tanamaan Hutan  
Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetic, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan
  49. Pengusahaan Pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun buru  
Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten



50. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar  
Pemberian perizinan pemanfaatan pertumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
51. Lembaga konservasi  
Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun, binatang, taman safari,) skala kabupaten
52. Perlindungan hutan
  - a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak hutan adat skala kabupaten
53. Penelitian dan pengembangan kehutanan  
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hukum produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten
54. Penyuluhan kehutanan  
Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten
55. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan  
Bimbingan, supervise, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten
56. Pengawasan bidang kehutanan  
Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

## **BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL**

### **1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air tanah**

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah
- b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral batu bara serta panas bumi skala kabupaten
- c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten
- d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten

- e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
- f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
- h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten
- i. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten
- j. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten
- k. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten
- l. Penetapan wilayah konsevasi air tanah dalam wilayah kabupaten
- m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batu bara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten
- n. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten
- o. Pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten
- p. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah kabupaten
- q. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten

## **2. Geologi**

- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten
- b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karet dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten

- c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten
- d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten
- e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten
- f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
- g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
- i. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
- j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyidik bumi nasional pada wilayah kabupaten
- k. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten

### **3. Ketenagalistrikan**

- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan
- b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten
- c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energy listriknya dalam kabupaten
- d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya di keluarkan oleh kabupaten
- e. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk pemegang IUKU yang izin usahanya di keluarkan oleh kabupaten
- f. Pemberian IUKS yang sarana instalansinya dalam kabupaten
- g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKUS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten
- h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten
- j. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten
- k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten

### **4. Minyak dan Gas Bumi**

- a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas)
  - 1) Penghitungan produksi dan realisasi *lifing* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah

- 2) Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten
  - 3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
- b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
- 1) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten
  - 2) a. Pemantuan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten
    - b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas
    - c. Pemberian izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)
- c. Kegiatan usaha jasa penunjang minyak bumi dan gas bumi
- 1) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi
  - 2) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional

#### **5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

- a. Penyertaan dan / atau memfasilitasi penyelenggaraan *assessment* bekerjasama dengan lembaga *assessment* DESDM.
- b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber mineral dalam skala kabupaten

### **CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **1. Kelautan**

- 1) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten
- 2) Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten
- 3) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam wilayah laut kewenangan kabupaten

- 4) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten
- 5) Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten
- 6) Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut
- 7) Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten
- 8) Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten
- 9) Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan dengan pemerintah dan provinsi
- 10) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten
- 11) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam wilayah di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten
- 12) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
- 13) Pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten
- 14) Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten
- 15) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten
- 16) Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya
- 17) Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya
- 18) Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia
- 19) Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi
- 20) Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten
- 21) Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten

- 22) Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten
- 23) Pelaksanaan eksplorasi, eksplotasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten
- 24) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten
- 25) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten
- 26) Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten
- 27) Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
- 28) Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang)

## **2. Umum**

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten
- b. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten
- d. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
- e. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten
- f. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perikanan skala kabupaten
- h. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten
- j. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten
- l. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

### 3. Perikanan Tangkap

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten
- b. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
- c. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
- d. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan diperairan wilayah kewenangan kabupaten
- e. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.
- f. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten
- g. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten
- h. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
- i. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten
- j. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten
- k.
  - a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten
  - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan di tempat pelelangan ikan (TPI)
- l. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain
- m. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan
- n. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT
- o. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan
- p. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkapan ikan
- q. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
- r. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
- s. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan menjadikan kewenangan kabupaten
- t. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten

#### **4. Perikanan Budidaya**

- a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan
- b. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan air tawar, air payau dan laut
- c. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan
- d. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis pakan ikan
- e. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga serifikasi pembenihan ikan
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan
- g. Pelaksanaan kebijakan pengolahan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- h. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan
- i. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
- j. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk / benih ikan
- k. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam
- l. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten
- m. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan
- n. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- o. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya
- p. Kombinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
- q. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota
- r. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi
- s. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan
- t. Pembinaan dan pengembangan kerja dan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan
- u. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten

#### **5. Pengawasan dan Pengendalian**

- a. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan
- b. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan



- c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi pembenihan ikan
- d. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya
- e. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan
- f. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan
- g. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten
- h. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten

## **6. Pengolahan dan Pemasaran**

- a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya
- b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan
- c. Pelaksanaan dan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotic dan cemaran mikroba tambahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup
- e. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan
- f. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten

## **7. Penyuluhan dan Pendidikan**

- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten
- b. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten
- c. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten

## **DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

### **1. Pembinaan Dalam Negeri**

- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten
- b. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten / kota ( SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk di minum di tempat, untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15% rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau
- c. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten
- d. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten
- e. Pembinaan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar / tokoh modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (biasa pameran, konvensi, dan seminar dagang)
- f. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten
- g. Pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten
- h. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten
- i. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
- j. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten
- k. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten
- l. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK
- m. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM
- n. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
- o. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen
- p. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa
- q. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten

- r. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
- s. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
- t. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten
- u. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten
- v. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten
- w. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten
- x. Pelaksanaan dan pelapor sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten

## **2. Metrologi Legal**

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang berdasarkan rekomendasi provinsi
- b. Fasilitas dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten
- c. Fasilitas standar ukuran dan laboratorium metrologi legal
- d. Pelayanan tera dan tera ulang UTIP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah
- e. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamanan UTIP, BDKT, dan SI
- g. Pembinaan operasional reparatir UTIP, pengawasan dan penyelidikan tindak pidana UUMI

## **3. Perdagangan Luar Negeri**

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor
- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten
- c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor
- d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor
- e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor
- f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten
- g. Pengambilan contoh, pengujian, impeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
  - 1) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
  - 2) Pengujian, impeksi, teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, impeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

- h. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten
- i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang
- j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk
- k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API
- l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API
- m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
- n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional
- o. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten
- p. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri

#### **4. Kerjasama Perdagangan Internasional**

- a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
- b. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
- c. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral, monitoring dan sosialisasi dumping subsidi dan *safeguard*

#### **5. Pengembangan Ekspor Nasional**

- a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten

#### **6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif, Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar lelang**

- a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
- b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang
- c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten

## **EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**

### **1. Perizinan**

- a. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tanpa usaha
- b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provensi
- c. Penerbitan isin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten

### **2. Usaha industri**

Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten

### **3. Fasilitas usaha industri**

Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten

### **4. Perlindungan usaha industri**

Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten

### **5. Perencanaan dan program**

- a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten
- b. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri
- c. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri
- d.

### **6. Pemasaran**

Peromosi produk industri kabupaten

### **7. Teknologi**

- a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kabupaten
- b. Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
- c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri

### **8. Standarisasi**

- a. Fasilitas dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten
- b. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten

### **9. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina industri kabupaten
- b. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembinaan industri di kabupaten

#### **10. Permodalan**

Fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten

#### **11. Lingkungan Hidup**

- a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten
- b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten

#### **12. Kerjasama Industri**

- a. Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menengah, dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten
- b. Fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten
- c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri kabupaten

#### **13. Kelembagaan**

- a. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten
- b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksanaan teknis tingkat kabupaten

#### **14. Sarana dan Prasaran**

Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional provinsi.

#### **15. Informasi Industri**

Pengumpulan, analisa, dan desiminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi

#### **16. Pengawasan Industri**

Pengawasan terhadap pelaksana tugas desentralisasi di bidang industri tingkat kabupaten

**17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian kabupaten

**Pj. BUPATI SIGI,**

**SUTRISNO N. SEMBIRING**

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
Pada tanggal 2010

**Pj. BUPATI SIGI,**

**SUTRISNO N. SEMBIRING**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**Drs. H.ANDIWAN P. BETHALEMBAH**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**Nip. 19551110 198202 1 006**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR.....



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
Pada tanggal 17 April 2010

**Pj. BUPATI SIGI,**

ttd

**SUTRISNO N. SEMBIRING**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 17 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**



**ANDIWAN P. BETHALEMBAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 3